

---

**DINAMIKA KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA: ANALISIS  
INFRASTRUKTUR, KINERJA EKONOMI, DAN PELAYANAN SOSIAL DI  
TINGKAT PROVINSI (2013-2022)**

Siti Raehanun Shalehah<sup>1</sup>, Luluk Fadliyanti<sup>2</sup>, Jaka Anggara<sup>3</sup>  
Universitas Mataram  
email: straehanun20@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika ketimpangan pendapatan di 30 provinsi di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022, dengan menggunakan data panel yang mencakup 300 observasi. Fokus penelitian ini adalah pengaruh aktivitas ekonomi, layanan dasar, dan tantangan sosial terhadap koefisien gini, ukuran yang telah mapan untuk menggambarkan disparitas pendapatan. Permasalahan tersebut menjadi salah satu penghalang Indonesia bisa menjadi negara maju dan selalu stagnasi di negara berkembang. Dengan menerapkan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) dan *Principal Component Analysis* (PCA), penelitian ini menemukan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar berkorelasi dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, tantangan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara langsung, menunjukkan interaksi yang lebih kompleks dengan distribusi pendapatan. Temuan ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan infrastruktur dalam mengurangi disparitas pendapatan, memberikan wawasan kebijakan untuk mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Pendapatan, Koefisien Gini, Pembangunan Ekonomi, Layanan Dasar, Tantangan Sosial Indonesia, *Principal Component Analysis*

**PENDAHULUAN**

Isu ekonomi global yakni ketimpangan menjadi isu yang memerlukan tindak lanjut serius terutama bagi pemangku kebijakan. Tentunya ini selaras dengan tujuan SDGs nomor 10, salah satu target SDGs yakni dapat mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk secara progresif di tahun 2030 khususnya yang masih di bawah 40% mencakup keseluruhan total populasi di tingkat rata-rata nasional (Bappenas, 2022). Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan yang tinggi tersebut mengharuskan dunia berpikir keras dalam menurunkan ketimpangan yang terjadi.

Pembangunan ekonomi disebut sebagai suatu proses peningkatan pendapatan per kapita penduduk dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk lebih mendasar pada struktur perekonomian daerah itu sendiri. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat (Agusalim & Pohan, 2018). Maka, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan demi kesejahteraan Masyarakat menjadi gebrakan yang harus dilakukan. Dalam kasus ini, intervensi pemerintah sangatlah berperan penting sebagai tonggak dalam mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik. Salah satu faktor yang

menjadi akar penyebab pertumbuhan ekonomi adalah ketimpangan pendapatan (Rozali et al., 2022).

Dinamika ketimpangan pendapatan merupakan kondisi kesenjangan pendapatan pada pendapatan dari aktivitas pekerjaan dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat (Todaro & Smith, 2006). Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebagian masalah yang kerap kali terjadi karena adanya perbedaan pembayaran antara daerah tertinggal dan daerah maju. Semakin besar kesenjangan pendapatan maka semakin besar pula variasi distribusi pendapatan tentu inilah yang menyebabkan disparitas pendapatan (Musdifar, 2012). Indonesia sebagai negara berkembang dapat dikatakan masih berada dalam status kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Hal ini berimbas pada permasalahan ketimpangan pendapatan di Indonesia yang masih menjadi isu perekonomian yang masih belum dapat teratasi secara menyeluruh (Hasyim, 2015).

Perbedaan tingkat pendapatan yang terjadi antara kelompok si kaya dan kelompok si miskin menjadi pemicu terjadinya ketimpangan pendapatan di Indonesia (Verianto et al., 2022). Hal ini di buktikan juga pernyataan (Yusuf et al., 2014) implikasi dari adanya perbedaan tingkat pendapatan antar individu dikarenakan perbedaan kualitas indeks pembangunan manusia dan perbedaan pengendalian modal. Melihat sisi geografis Indonesia di mana masyarakat yang tersebar di berbagai kondisi wilayah, seperti desa dan kota menjadi salah satu tolok ukur tingkat pendapatan yang dirasakan sehingga menjadi tidak sebanding (Badan Pusat Statistik, 2020).

Untuk mengetahui bagaimana angka ketimpangan pendapatan itu terjadi dapat diukur menggunakan dengan koefisien gini (rasio gini). Angka dari koefisien gini terhitung dari 0 sampai 1. Ditunjukkan nilai koefisien 0 diartikan bahwa adanya pemerataan sempurna, sedangkan jika mendekati nilai 1 diartikan bahwa daerah tersebut menuju timpang. Dengan rasio gini juga bisa menampilkan ketidaksetaraan dengan alat analisis rasio seperti pendapatan per kapita dan produk domestik bruto (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada September 2022, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini adalah sebesar 0,381. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2022 yang sebesar 0,384, namun tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan rasio gini September 2021 yaitu sebesar 0,381 (BPS, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun masalah penelitian yang ingin ditinjau yakni bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Tahun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Penanaman Modal Asing, Distribusi Air Bersih, Distribusi Tenaga Listrik, Panjang Jalan Rata-Rata, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan gagasan pemikiran dan masukan terutama untuk pemerintah sebagai acuan dalam membuat kebijakan kedepan terkait ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada ketimpangan pendapatan di 30 provinsi di Indonesia. Metode pemilihan yang sistematis telah menghasilkan kumpulan data yang inklusif dengan total 30 observasi, yang meliputi seluruh 30 provinsi selama periode sepuluh tahun di Indonesia. Provinsi-provinsi yang dipilih dalam penelitian ini didasarkan pada integritas dan kelengkapan data yang meliputi aspek-aspek seperti pembangunan atau aktivitas ekonomi, layanan dasar, kualitas hidup, dan tantangan sosial. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari periode tahun 2013 hingga 2022. data yang digunakan bersifat kuantitatif berbentuk data panel, yang merupakan kombinasi dari data *time series* dari tahun 2013 hingga 2022 dan data *cross section* dari 30 provinsi di Indonesia. Sumber data diperoleh dari publikasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan hasil *Ordinary Least Squares* (OLS) menunjukkan R-squared yang cukup baik yaitu yaitu 0,3185 yang mengindikasikan bahwa lebih dari 31% variabilitas dalam koefisien gini dapat dijelaskan oleh prediktor-prediktor model yang digunakan. Namun, adanya multikolinearitas di antara prediktor-prediktor ini dapat meningkatkan kesalahan standar dari estimasi koefisien, hal ini dibuktikan dengan nilai R-squared yang disesuaikan yang relatif lebih rendah yaitu 0,2924. Koefisien

regresi memiliki rentang tingkat signifikansi yang beragam, dengan variabel-variabel seperti 'log\_panjang jalan rata-rata', 'log\_PDRB per tahun', dan 'Tingkat Pengangguran Terbuka' menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik dengan koefisien gini, sementara variabel-variabel lain seperti 'Distribusi Air Bersih', 'Pertumbuhan Ekonomi', dan 'log\_PMA' tidak signifikan pada tingkat signifikansi yang lazim.

Penerapan *Principal Component Analysis* (PCA) diusulkan untuk menyempurnakan model dengan mentransformasikan variabel-variabel yang berkorelasi menjadi sejumlah kecil komponen utama yang menangkap varians yang signifikan namun tetap tidak berkorelasi, sehingga meningkatkan kemampuan interpretasi dan ketahanan model (Jolliffe, 2002). Dengan menggunakan PCA, kompleksitas model dapat dikurangi, sehingga dapat menangkap dinamika yang mendasari indeks Gini dengan lebih akurat dan mendukung analisis ekonometrik yang lebih andal.

Menurut Kaiser (1974), nilai KMO dapat diberi label berdasarkan kesesuaiannya untuk analisis faktor sebagai berikut: Nilai KMO dari 0.00 sampai 0.49 dianggap tidak dapat diterima, menunjukkan bahwa data tidak cocok untuk PCA. Nilai yang berkisar antara 0,50 hingga 0,59 diberi label sebagai nilai yang menyedihkan, yang masih menunjukkan kecocokan yang buruk. KMO dari 0,60 hingga 0,69 dianggap biasa-biasa saja, menunjukkan beberapa potensi untuk PCA tetapi dengan beberapa catatan. Nilai dari 0,70 hingga 0,79 digambarkan sebagai sedang, menunjukkan kecocokan moderat untuk PCA. Nilai KMO dari 0,80 hingga 0,89 dianggap berjasa, mencerminkan kecocokan yang baik, dan nilai dari 0,90 hingga 1,00 diberi label luar biasa, menunjukkan kecocokan yang sangat baik untuk PCA.

Nilai PCA yang diperoleh dari analisis ini kemudian dimasukkan ke dalam model ekonometrik sebagai variabel independen untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks Gini dengan lebih baik. Model empiris yang diformulasikan dalam penelitian ini, yang masing-masing menggunakan hasil PCA, direpresentasikan sebagai berikut:

Model Kuadrat Terkecil Biasa (OLS):

$$gini_{it} = \alpha + \gamma_1 PC1_{it} + \gamma_2 PC2_{it} + \dots + \gamma_n PCn_{it} + \epsilon_{it}$$

Model Efek Tetap:

$$gini_{it} = \alpha_i + \gamma_1 PC1_{it} + \gamma_2 PC2_{it} + \dots + \gamma_n PCn_{it} + u_{it}$$

Model Efek Acak:

$$gini_{it} = \alpha + \gamma_1 PC1_{it} + \gamma_2 PC2_{it} + \dots + \gamma_n PCn_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$$

PCA pada awalnya diterapkan pada kumpulan sebelas prediktor, menghasilkan ekstraksi empat komponen utama, yang secara kumulatif menjelaskan sekitar 70,76% dari total varians. Komponen-komponen ini ditafsirkan sebagai merangkum proporsi varians yang signifikan, dengan empat komponen pertama menjelaskan 32,29%, 15,53%, 13,14%, dan 9,80%, masing-masing. Selanjutnya, ukuran Kaiser Meyer Olkin (KMO) digunakan untuk mengevaluasi kecukupan sampel untuk PCA. Nilai KMO secara keseluruhan ditentukan sebesar 0,6170, dengan variabel individu menunjukkan kisaran kecukupan, dari 0,3258 untuk 'Pertumbuhan Ekonomi' hingga 0,8571 untuk 'Distribusi Air Bersih'.

Proses PCA melibatkan penyempurnaan berulang untuk mengoptimalkan set variabel. Penyempurnaan dimulai dengan penghapusan variabel yang menunjukkan nilai KMO yang tidak optimal, dimulai dengan 'Pertumbuhan Ekonomi' karena nilainya yang paling rendah, diikuti dengan penghapusan berurutan dari 'log\_Panjang Jalan rata-rata' dan 'TPAK'. Iterasi terakhir mengarah pada pengecualian 'Distribusi Tenaga Listrik', mencapai ukuran KMO keseluruhan di atas 0,70, yang mengindikasikan seperangkat variabel yang telah disempurnakan dengan baik untuk PCA. Hasil akhir dari PCA menghasilkan tiga komponen utama yang menjelaskan 75,25% dari varians. Ukuran KMO secara keseluruhan meningkat secara signifikan pada 0.7031 (Tabel. 3).

**Tabel 1**  
**Hasil PCA Iteratif dan Pengecualian Variabel**

Proses	Deskripsi	Nilai Eigen	Proporsi Varians yang Dijelaskan	Varians Kumulatif Dijelaskan	Ukuran KMO	Catatan
1	PCA awal	Comp1: 3.5515	Comp1: 32,29%	70.76%	Secara keseluruhan: 0,6170	“Pertumbuhan Ekonom” memiliki KMO terendah (0,3258)
	dengan semua variabel	Comp2: 1.7088 Comp3: 1.4454 Comp4: 1.0784	Comp2: 15,53% Comp3: 13,14% Comp4: 9,80%			
2	PCA tidak termasuk 'Pertumbuhan Ekonomi'	Comp1: 3.5146 Comp2: 1.7048 Comp3: 1.4425 Comp4: 1.0212	Comp1: 35,15% Comp2: 17,05% Comp3: 14,43% Comp4: 10,21%	76.83%	Secara keseluruhan: 0,6418	“Panjang jalan rata-rata” memiliki KMO terendah berikutnya (0,4280)
3	PCA tidak termasuk 'Panjang Jalan rata-rata'	Comp1: 3.5136 Comp2: 1.6285 Comp3: 1.3079	Comp1: 39,04% Comp2: 18,09% Comp3: 14,53%	71.67%	Secara keseluruhan: 0,6480	“TPAK” memiliki KMO terendah berikutnya (0,5107)
4	PCA tidak termasuk 'TPAK'	Comp1: 3.4132 Comp2: 1.4710 Comp3: 1.0581	Comp1: 42,66% Comp2: 18,39% Comp3: 13,23%	74.28%	Secara keseluruhan : 0,6696	“Distribusi Tenaga Listrik” memiliki KMO terendah berikutnya (0,5444)
5	PCA tidak termasuk 'Distribusi Tenaga Listrik'	Comp1: 3.1577 Comp2: 1.1064 Comp3: 1.0034	Comp1: 45,11% Comp2: 15,81% Comp3: 14,33%	75.25%	Secara keseluruhan : 0,7031	Ditujukan untuk KMO keseluruhan > 0,70
6	PCA akhir (diputar)	Comp1: 2.4658 Comp2: 1.6840 Comp3: 1.1177	Comp1: 35,23% Comp2: 24,06% Comp3: 15,97%	75.25%	Secara keseluruhan : 0,7031	Rotasi Varimax diterapkan untuk kemampuan interpretasi

Sumber : Data diolah, 2024

Model efek tetap dengan galat standar yang kuat ditemukan sebagai model yang paling efektif, terutama karena kemampuannya yang lebih baik dalam menangani nuansa statistik. Versi kuat dari model efek tetap menunjukkan kekuatan penjas yang substansial dalam kelompok dengan nilai R-

squared yang disesuaikan sebesar 0,3363, yang mengindikasikan bahwa model ini memberikan kecocokan terbaik dan menjelaskan kompleksitas prediktor. Khususnya, variabel 'Aktivitas Ekonomi (Comp1)' menunjukkan korelasi negatif yang signifikan dengan ketimpangan pendapatan, yang dibuktikan dengan koefisien -0,0057 dan kesalahan standar 0,0027. 'Layanan Dasar & Kualitas Hidup (Comp2)' juga menunjukkan dampak negatif yang kuat terhadap ketimpangan pendapatan, dengan koefisien -0,0126 dan kesalahan standar 0,0023. Sebaliknya, 'Tantangan Sosial (Comp3)' tidak secara signifikan memengaruhi ketimpangan pendapatan.

Komponen utama yang dihasilkan menjalani rotasi varimax ortogonal untuk meningkatkan kemampuan interpretasi. Rotasi ini bertujuan untuk memaksimalkan varians yang dijelaskan oleh masing-masing muatan komponen, sehingga menghasilkan struktur faktor yang lebih jelas dan lebih mudah diinterpretasikan. Komponen yang dirotasi kemudian diberi label untuk mencerminkan konstruk yang diwakilinya: "Komponen Kegiatan Ekonomi," "Komponen Layanan Dasar & Kualitas Hidup," dan "Komponen Tantangan Sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Korelasi negatif antara komponen Aktivitas Ekonomi dan rasio gini, yang ditunjukkan oleh koefisien -0,0056826, secara statistik signifikan dan sejalan dengan literatur teoritis dan empiris yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan mekanisme penting untuk mengurangi ketimpangan. Perspektif ini didukung oleh Barro (2000) dan Sachs (2015), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan peningkatan produksi, investasi, dan konsumsi, dapat mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di seluruh populasi. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh Stiglitz (2012), pertumbuhan ekonomi yang mencakup diversifikasi ekonomi dan peningkatan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan tingkat pendapatan di berbagai sektor, sehingga berpotensi mengurangi kesenjangan pendapatan.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti Sunanda (2017) dengan judul "Ketimpangan Perekonomian di Provinsi Bengkulu dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya tahun 2011-2014" memperoleh kesimpulan bahwa PDRB berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Sunanda, 2017). Selaras juga penelitian oleh Sari (2021) dengan judul "Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014- 2019" menyimpulkan bahwa PDRB bernilai negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) (R. N. I. Sari, 2021).

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRBPKP) memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Gini). Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa PDRBPKP tidak berpengaruh secara parsial, namun berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRBPKP memiliki hubungan negatif dengan ketimpangan pendapatan (Gini), yang artinya semakin tinggi nilai PDRBPKP maka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan (Gini). Begitu juga sebaliknya, tingginya nilai PDRBPKP mencerminkan keberhasilan suatu wilayah atau daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2019) dengan judul "Analisis Pengaruh PAD, PMA, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan di Pulau Jawa tahun 2012-2018" mendapatkan hasil bahwa PMA berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan (Ibrahim, 2019). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Gini). Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa PMA berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, yang artinya semakin tinggi tingkat PMA maka tingkat ketimpangan pendapatan (Gini) di suatu wilayah akan menurun. Adanya penanaman modal asing (PMA) tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari PMA adalah meningkatnya ketimpangan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Togar Laut (2020) dan Ibrahim (2019) yang menunjukkan bahwa PMA berpengaruh negatif dan signifikan dengan ketimpangan pendapatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PMA memiliki hubungan negatif dengan ketimpangan. Masuknya PMA yang diikuti dengan adanya transfer teknologi

membuat produktivitas tenaga kerja meningkat yang kemudian akan menaikkan pendapatan tenaga kerja. Kemudian dengan adanya peningkatan PMA, maka Infrastruktur dan perekonomian akan terus berkembang dan menjadi alasan bagi investor untuk menginvestasikan dananya ke berbagai daerah. Oleh karena itu, akan lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia dan akhirnya mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Hubungan terbalik yang signifikan antara Layanan Dasar & Kualitas Hidup dan ketimpangan pendapatan (-0,0125519) menggarisbawahi pentingnya infrastruktur sosial dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Temuan ini mendukung Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP, 2016), yang mengidentifikasi akses terhadap air bersih dan indeks pembangunan manusia yang tinggi sebagai hal yang mendasar dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan. Sen (1999) menjelaskan lebih lanjut bahwa akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tidak hanya merupakan hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga merupakan komponen penting dari keamanan dan kesetaraan ekonomi.

Meningkatkan layanan-layanan ini memastikan bahwa semua segmen masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sehingga mendorong pembangunan yang adil.

Hasil pengujian tantangan sosial menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sebagaimana diwakili oleh tingkat kemiskinan dan pengangguran, menunjukkan bahwa faktor-faktor ini mungkin berinteraksi dengan distribusi pendapatan dengan cara yang lebih kompleks daripada yang dapat ditangkap oleh model linier langsung. Ravallion (2001) mencatat bahwa hubungan antara kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sering kali dimediasi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan pemerintah, siklus ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Hal ini mengimplikasikan bahwa untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan strategi multi-segi yang mempertimbangkan variabel-variabel yang mendasari dan mengintervensi. Hal ini selaras dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti pengujian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang positif terhadap ketimpangan pendapatan (Gini). Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pradipta & Wijaya, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pendapatan (Gini), yang artinya semakin tinggi nilai IPM maka akan semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan (Gini) di suatu wilayah. Begitu juga sebaliknya, rendahnya nilai IPM mencerminkan tidak berhasilnya suatu wilayah atau daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia, sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Namun, menurut pendapat peneliti IPM seharusnya berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, karena dengan meningkatnya IPM maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, dengan adanya SDM yang baik dan berkualitas ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan dan kompetensi melalui Pendidikan, maka modal manusia (human capital) akan membaik dan SDM yang berkualitas tersebut akan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak, sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di berbagai wilayah, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suhendra et al., 2020).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini memperkuat pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses ke layanan dasar merupakan strategi kunci untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Analisis menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dan model efek tetap menunjukkan bahwa kedua faktor ini secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan. Namun, tantangan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model yang digunakan, menunjukkan bahwa permasalahan ini membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih kompleks dan terintegrasi. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperbaiki infrastruktur serta layanan dasar diperlukan

untuk mengatasi disparitas pendapatan. Penelitian mendatang perlu mengeksplorasi lebih jauh dengan variabel tambahan yang mungkin berpengaruh pada ketimpangan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Hasil analisis mendukung literatur yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses terhadap layanan dasar adalah mekanisme penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan infrastruktur dasar, dan layanan sosial dapat efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## **REFERENSI**

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Mengapa Negara-negara Gagal: Asal-usul Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan*. Crown Publishing Group.
- Agusalim, L., & Pohan, FS (2018). Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan Pendapatan: Bukti Empiris dari Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 1–14.
- Arif Rahman, Ahmad Albar Tanjung, Ramli, Muhammad Arif. 2023. Faktor Penentu Ketimpangan Pendapatan Dalam Persepektif Waktu di Indonesia. *Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi*. Universitas Negeri Semarang, Semarang, 12.
- Arif, M., & Wicaksani, RA (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Kolokium Penelitian Universitas*, 323–328.
- Badan Pusat Statistik. (2022a). *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa), 2018-2020*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Rasio Gini Provinsi 2002-2020*. Badan Pusat Statistik.
- Bappenas 2017 Atasi Isu Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan dan Wilayah, Bappenas Gelar IDF Tahun 2017 | Kementerian PPN/Bappenas.
- Baldwin, RE (1986). *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*, terjemahan St.Dianjung [Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi]. PT Bina Aksara.
- Barro, R. J. (2000). "Ketimpangan dan Pertumbuhan dalam Panel Negara." *Journal of Economic Growth*, 5(1), 5-32.
- Berman, Y., Ben-Jacob, E., & Shapira, Y. (2016). Dinamika Ketimpangan Kekayaan dan Pengaruh Distribusi Pendapatan. *PLOS SATU*, 11(4), e0154196.
- Boediono. (1990). *Seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi no. 2: Ekonomi Makro*. BPFE- UGM.
- Chan, T. (2022). Pada kelas baru indeks ketimpangan berkelanjutan. *Ilmu Sosial Matematika*, 120, 8–23.
- Hasyim, MR (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2015. 1–15.
- Ibrahim, M. M. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pembangunan di

Pulau Jawa Tahun 2012-2018.

- Imam Mahdi, Setyo Wahyu Sulistyono. 2022. Faktor Penentu Rasio Gini: Studi Kasus Rendahnya Rasio Gini di Madura. *Kewirausahaan Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*. Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram, di Yogyakarta, 4 (2), 245-260. 10.37631/ebisma.v4i2.1119.
- Inoua, S. (2021). Waspada! Indeks Gini! Ukuran Ketimpangan Baru. *Makalah Kerja ESI 21-18*.
- Khoiruddin, R., & Musta'in, JL (2020). Analisa determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta [Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta]. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17-30.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan [Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan]*. UPP AMP YKPN
- Kuznets, S. (1955). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan*. Tinjauan Ekonomi Amerika, Jilid XLV.
- Laut, L. T., Putri, A. S., & Septiani, Y. (2020). Pengaruh Pma, Pmdn, Tpk, Pdrb Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Disparitas Pendapatan Jawa.
- Mauliddah, NL, & Rosmaniar, A. (2020). Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur. 436, 58–61.
- Miftahul Janah. 2022. Analisis Pengaruh Tingkat PDRB PerKapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia periode tahun 2019 – 2021. *Jurnal Manajemen, Bisni dan Akuntansi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. 1 (4), e-ISSN: 2963-5292; p-ISSN: 2963-4989.
- Musdifar, M. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010.
- OECD (2015). *In It Together: Mengapa Mengurangi Ketimpangan Menguntungkan Semua Orang*. Penerbitan OECD.
- Verianto, MI, Faiq, MN., & Aisyah Tarassya. (2022). Pengaruh Pandemi Covid- 19 Terhadap Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur: Apa Kebijakan Publik yang Tepat?. *JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan)*, 7(1), 75–84.
- Ravallion, M. (2001). "Pertumbuhan, Ketimpangan dan Kemiskinan: Melihat Lebih Jauh dari Rata-Rata." *World Development*, 29(11), 1803-1815.
- Rozali, M., Hasibuan, M., & Nainggolan, LE (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Implikasinya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(1), 11–24.
- Sachs, J. D. (2015). *Era Pembangunan Berkelanjutan*. Columbia University Press. Sen, A.



- (1999). *Pembangunan sebagai Kebebasan*. Oxford University Press.
- Sadono, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* [Pembangunan Ekonomi: Proses, Permasalahan, dan Dasar Kebijakan]. Grup Media Prenada.
- Sari, R. N. I. (2021). Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014-2019
- Suhendra, I., Istikomah, N., Ginanjar, R. A. F., & Anwar, C. J. (2020). Human Capital, Income Inequality and Economic Variables: A Panel Data Estimation from a Region in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 571–579.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* [Regional Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi]. Raja Grafindo Persada.
- Stiglitz, J. E. (2012). *Harga Ketidaksetaraan: Bagaimana Masyarakat yang Terpecah Belah Membahayakan Masa Depan Kita*. W.W. Norton & Company.
- Sunanda, S. (2017). Ketimpangan Perekonomian di Provinsi Bengkulu dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya (Tahun 2011-2014). 1– 14.
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2012). Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia sebelum dan sesudah krisis keuangan Asia. *Buletin Kajian Ekonomi Indonesia*, 48(2), 209-227.
- Pradipta, A. I., & Wijaya, R. S. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ekonomika*, 6(1), 110–122.
- Wibowo. 2022. Determinan Ketimpangan Pendapatan Desa dan Kota di Indonesia. *JDE (Jurnal Ekonomi Berkembang)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, 7 (2), 266-279.
- Yusuf, AA, Sumner, A., & Rum, IA (2014). Ketimpangan pengeluaran selama dua puluh tahun di Indonesia, 1993–2013. *Buletin Kajian Ekonomi Indonesia*, 50(2), 243-254.